



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, RISTEK DIKTI, EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: <b>Kepala Perpustakaan RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Rabu, 23 Mei 2018.</b>
Pukul	: <b>13.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir.H.A.R.Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh.S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. <b>Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017;</b> 2. <b>Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018;</b> 3. <b>Kajian Kebijakan E-Journal</b> 4. <b>Program Pengembangan Deposit Bahan Pustaka</b> 5. <b>Persiapan Pembahasan Tk I Rancangan Undang-Undang Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)</b>
Hadir	: 42 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Muhammad Syarif Bando/Kepala Perpustakaan RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.00 WIB oleh DR. Ir. Djoko Udjianto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI dan dilanjutkan oleh Ir.H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan RI serta menampung pertanyaan, saran Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**A. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017.**

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan semester II Tahun 2017 Nomor 20/HP/XVI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 adalah Rekomendasi yang

telah ditindaklanjuti sebanyak 16 rekomendasi dari 20 rekomendasi atau 80% 4 (empat) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.

2. Atas hasil pemantauan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Atas 4 (empat) rekomendasi yang dalam proses tindak lanjut:
    - 1) Menginstruksikan kepada pengelola persediaan untuk melakukan stock opname barang persediaan secara periodik dan membuat Berita Acara disetiap akhir semester.
    - 2) Menginstruksikan kepada pengelola SIMAK-BMN untuk inventarisasi ulang peralatan dan mesin, melakukan proses penghapusan dan melakukan pengendalian aset.
    - 3) Menginstruksikan kepada Kepala UPT Bung Karno dan UPT Bung Hatta untuk melakukan penilaian ulang dan pencatatan dalam SIMAK-BMN, dan mengajukan pengesahan ke Kementerian Keuangan RI.
    - 4) Memerintahkan kepada Inspektorat untuk menghitung dan memantau penyetoran denda keterlambatan serta pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
  - b. Atas sisa temuan kerugian negara sebesar Rp24.829.000 (*Dua puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*):
    - 1) Inspektorat telah melakukan penghitungan denda keterlambatan berkoordinasi dengan PPK Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca.
    - 2) PPK Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca telah menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp24.829.000,- (*Dua puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) ke Kas Negara.

**B. Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018.**

1. Berdasarkan DIPA No.SP DIPA-057.01-0/2018 Pagu Anggaran Tahun 2018 Perpustakaan Nasional adalah Rp584.933.638.000.- (*Lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
2. Kepala Perpustakaan Nasional RI menyampaikan bahwa Realisasi Anggaran Kwartal I Tahun 2018 per tanggal 21 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional RI	Rp181,75M	Rp51,73M	28.46
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional RI.	Rp3,85M	Rp335Juta	8.70
Program Pengembangan Perpustakaan.	Rp399,33M	Rp23,99M	6.01
Total	Rp584,93M	Rp76M	13.01

**C. Kajian Kebijakan E-Journal.**

1. Perpustakaan Nasional menyampaikan bahwa saat ini tersedia *e-Book* dan *e-Journal fulltext*. Layanan online untuk mengakses buku dan jurnal elektronik terbuka bagi seluruh mahasiswa Indonesia. Jumlah koleksi saat ini sejumlah lebih dari 2.109.450.000 judul artikel jurnal.
2. Perpustakaan Nasional berencana melakukan impementasi pemusatan langganan *e-journal* yang bersifat tidak spesifik yang dapat diakses secara nasional. Hal ini memungkinkan perguruan tinggi yang memerlukan *e-journal* spesifik tetap dapat berlanggan sesuai kebutuhannya
3. Perpustakaan Nasional telah mengembangkan Strategi Akses Pemusatan *E-Resources* menggunakan konsep *Big Data* untuk komunikasi antar server untuk menjamin keamanan data masyarakat.
4. Saat Ini Indonesia *One Search* memperoleh 5.673.323 *Record Digital*. Potensi Implementasi Indonesia *One Search* dari perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus sebanyak 965 Perpustakaan Maka Jika Seluruh perpustakaan di Indonesia (154.359) Perpustakaan berkontribusi akan didapatkan +904.808.417 *Record Digital* yang dapat diakses untuk masyarakat

**D. Program Pengembangan Deposit Bahan Pustaka.**

1. Perpustakaan Nasional RI membangun dan mengembangkan pangkalan data Bibliografi Nasional yang berisi semua karya cetak, karya rekam dan karya digital atau elektronik yang terbit di Indonesia.
2. Ledakan data terbitan digital di Indonesia dimana setiap detik selalu ada berita baru, terbitan terbaru khususnya di ranah dunia maya, perpustakaan perlu tanggap terhadap ledakan data khususnya digital.
3. Untuk tahun 2018, berdasarkan Roadmap Perpustakaan Deposit maka target yang ingin dihasilkan tahun ini adalah:
  - a. Tersedianya aplikasi *e-deposit*.
  - b. Integrasi sistem ISBN, INLIS dan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI).

**E. Persiapan Pembahasan Tk I Rancangan Undang-Undang Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)**

1. Untuk Pembahasan Tingkat I RUU Tentang SSKCKR, berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-07/Pres/02/2018 menunjuk Kementerian:
  - a. Kemendikbud RI (penanggung jawab);
  - b. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - c. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
  - d. Kementerian Dalam Negeri;
  - e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Perpustakaan Nasional RI, Sekretariat Negara dan pihak terkait akan memulai pembahasan RUU Tentang SSKCKR.

**F. Lain-lain**

Perpustakaan Nasional RI menerima berbagai usulan DAK untuk pengembangan fasilitas dan layanan perpustakaan dari berbagai daerah pada RAPBN 2019 sebesar Rp 3.963.799.753.164,-. (*Tiga triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah*).



**G. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut:**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah Perpustakaan Nasional RI menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017.
2. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI meningkatkan daya serap APBN 2018, minimal hingga 49% di bulan Juli, sehingga daya serap APBN 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI melakukan koordinasi dengan Kemendikbud RI untuk mengatasi permasalahan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia.
4. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI agar menambah jumlah Tenaga Pustakawan dan mengajukan peningkatan Tunjangan Fungsional Pustakawan.
5. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI melakukan kajian dan sensus mengenai permasalahan umum perpustakaan sebagai dasar penyusunan Peta Jalan dalam upaya mengatasi permasalahan terkait literasi masyarakat secara komprehensif, terstruktur dan sistematis.
6. Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan RI melaporkan hasil Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018, dalam bentuk tertulis pada tanggal 31 Mei 2018.
7. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI terkait pemanfaatan dana desa untuk bidang perpustakaan.
8. Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 minggu pertama bulan September 2018.
9. Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lambat pada tanggal 31 Mei 2018 terhadap seluruh tanggapan/masukan/pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI.

**III. PENUTUP**

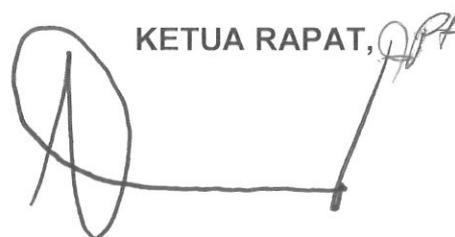
Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB

**KEPALA PERPUSNAS RI**



**MUHAMMAD SYARIF BANDO**

**KETUA RAPAT,**



**IR.H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.**